



## RILIS PERS

World Refugee Day 2023

**RISE Discussion Series “Welcoming the Global Refugee Forum 2023: The Role of Civil Society and Refugee Communities in the Development of International and National Refugee Situation”**

Jakarta - SUAKA dan Jesuit Refugee Service (JRS Indonesia) menyelenggarakan acara diskusi panel dengan nama *RISE Discussion Series* bertajuk *Welcoming the Global Refugee Forum 2023: The Role of Civil Society and Refugee Communities in the Development of International and National Refugee Situation*. Acara publik ini diselenggarakan pada tanggal 24 Juni 2023 dari pukul 13.30 hingga 17.00 WIB di Aula H.B. Jassin, Taman Ismail Marzuki Jakarta.

Acara ini bertujuan untuk mensosialisasikan tentang kondisi terbaru pengungsi di tingkat dunia khususnya di Indonesia baik dari segi perlindungan HAM bagi para pengungsi maupun perkembangan hukum sebagai upaya bersama dalam rangka menyambut Forum Pengungsi Global (*Global Refugee Forum*) tahun 2023. Dalam kegiatan diskusi ini turut hadir Nino Viartasiwi, Ph.D. (Akademisi Hubungan Internasional *President University*), Dr. Natalia Yeti Puspita, S.H., M.Hum. (Akademisi Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta), Nimo Ahmed (*Co-Founder Sisterhood Community*), Angga Reynady, S.H. (Staf Pemberdayaan dan Bantuan Hukum SUAKA) sebagai pembicara utama dan dua perwakilan dari komunitas pengungsi sebagai panelis diskusi - Abeer Abulamzy dan Nashaat Yousif. T turut hadir pula Enny Soeprapto, seorang pegiat isu pengungsi di Indonesia.

Dr. Natalia Yeti Puspita, S.H., M.Hum., memulai sesi dengan memaparkan materi terkait perubahan iklim yang turut berpengaruh dalam krisis migrasi global. Terdapat potensi yang besar dalam meningkatnya jumlah pengungsi disebabkan karena perubahan iklim dan bencana alam. Mengutip temuan *Institute for Economics and Peace* (IEP), ia memperkirakan bahwa 1,2 miliar orang akan kehilangan tempat tinggal karena perubahan iklim dan bencana alam.

Lebih jauh lagi, Dr. Natalia menjelaskan bahwa para pengungsi yang disebabkan oleh dampak bencana iklim tidak masuk kedalam kategori pengungsi di dalam Konvensi 1951 yang karenanya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan. Ia menyinggung kasus loane Teitiota, seorang pria dari Kiribati yang mendapatkan perlindungan hukum dari Komite

Hak Asasi Manusia PBB karena terdampak perubahan iklim usai ditolak suakanya oleh Selandia Baru.

Pembicara kedua adalah Nino Viartasiwi, Ph.D. yang menjelaskan risetnya bersama RDI UREF mengenai tantangan utama dalam perlindungan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Ia mencatat bahwa Indonesia belum memiliki sistem tata kelola pengungsi yang efektif dan komprehensif, meskipun telah ada Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Ia menuturkan bahwa terdapat kekurangan dalam koordinasi di antara Satuan Tugas (Satgas) dalam menangani masalah pengungsi. Selain itu, tidak adanya definisi hukum mengenai pengungsi di Indonesia membingungkan masyarakat yang pada akhirnya menghambat advokasi untuk mendapatkan perlindungan yang lebih baik bagi para pengungsi

Nino menambahkan, terdapat kesenjangan budaya dan sosial antara pengungsi dengan masyarakat lokal. Ia yakin bahwa proses integrasi sosial akan lebih mudah dan cepat dicapai ketika para pengungsi dapat berbaur dengan masyarakat lokal dalam hal bahasa, budaya dan norma-norma sosial masyarakat setempat. Sehingga ia sangat merekomendasikan untuk para pengungsi agar belajar bahasa Indonesia sehingga dapat membantu mereka untuk membaur dengan masyarakat kedepannya.

Pembicara ketiga adalah Nimo Ahmed *Co-Founder* dari *Sisterhood Community*. Ia memaparkan terkait tantangan pengungsi serta upaya untuk mendorong harapan para pengungsi di Indonesia melalui organisasi yang dibentuknya yaitu *Sisterhood Community*. Nimo memperkenalkan organisasinya dan bagaimana ia berkolaborasi dengan komunitas lokal untuk mendukung para perempuan pengungsi. Didirikan pada tahun 2018, *Sisterhood Community* adalah gerakan yang dipimpin sendiri oleh para perempuan pengungsi yang memberikan pelatihan keterampilan dari tingkat dasar hingga tingkat mahir seperti tata rias, menjahit, desain grafis, dan berbicara di depan umum. Pada tahun 2023, komunitas ini memiliki 500 anggota di seluruh Indonesia. Ia bersyukur bahwa anggota masyarakat setempat mendukung kegiatan komunitas ini, karena ada 33 sukarelawan non-pengungsi yang bekerja bersama Nimo dan tim. Ia menutup sambutannya dengan mengungkapkan serangkaian tantangan yang dihadapi komunitasnya sepanjang tahun 2023. Ia menyebutkan bahwa kesehatan mental dan keterbatasan anggaran dapat mempengaruhi keberlangsungan komunitas. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar mencari dana yang dapat diakses harus menjadi prioritas komunitas dan organisasi masyarakat sipil yang bertujuan untuk membantu para pengungsi di Indonesia.

Saat ini, di Indonesia setidaknya terdapat 12.000 pencari suaka dan pengungsi dari sekitar 50 negara. Namun hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi PBB 1951 tentang Pengungsi dan Protokol 1967 terkait Status Pengungsi. Ketangguhan sangat dibutuhkan

dalam menghadapi ketidakpastian akan masa depan mereka. Sehingga diperlukan satu wadah yang kemudian dapat mendorong para pengungsi untuk dapat meningkatkan kapasitas diri mereka.

Diskusi panel ditutup dengan presentasi dari Perkumpulan SUAKA. Diwakili oleh Angga, ia melaporkan program-program pemberdayaan dan bantuan hukum yang telah dilakukan SUAKA selama ini. Dalam hal kerja-kerja hukum, SUAKA telah menerima total 45 kasus pada tahun 2023. Data bulan Mei 2023 menunjukkan bahwa isu pemukiman kembali dan kekerasan mendominasi laporan dari komunitas pengungsi. Dari laporan tersebut, Angga menyoroti praktik yang mengkhawatirkan dari pihak imigrasi Indonesia yang melakukan pemulangan kembali (*refoulement*) terhadap pencari suaka dan/atau pengungsi. SUAKA mencatat ada 3 kasus *refoulement* sejak tahun 2020. SUAKA percaya bahwa organisasi masyarakat sipil harus bekerja sama untuk mengatasi masalah kendala bahasa, kesadaran akses yang tidak merata terhadap platform digital, sumber daya yang terbatas, dan kesadaran publik yang terbatas terhadap isu-isu pengungsi jika kita ingin memperluas basis dukungan untuk penanganan pengungsi yang komprehensif.

Angga juga menyinggung terkait *Global Refugee Forum* sebagai ajang diskusi perwakilan dan pemimpin negara terkait kewajiban bersama dalam perlindungan pengungsi secara global akan diadakan di penghujung akhir tahun ini. Adanya forum ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menunjukkan niat baiknya dalam membuat payung hukum terkait perlindungan hak pengungsi dan pencari suaka serta implementasi pelaksanaannya.

Selamat Hari Pengungsi Sedunia 2023

**Narahubung:**

Atika Yuanita Paraswaty: 081383399078 / atika@suaka.or.id

Dewi F Rahmasari: 08557227774 / dewi@suaka.or.id

# PRESS RELEASE

World Refugee Day 2023

## **RISE Discussion Series “Welcoming the Global Refugee Forum 2023: The Role of Civil Society and Refugee Communities in the Development of International and National Refugee Situation”**

Jakarta - SUAKA and Jesuit Refugee Service (JRS Indonesia) carried out a panel discussion event. RISE Discussion Series entitled "Welcoming the Global Refugee Forum 2023: The Role of Civil Society and Refugee Communities in the Development of International and National Refugee Situation". This public event was held on June 24, 2023 from 13.30 to 17.00 WIB in the H.B. Jassin Hall, Ismail Marzuki Park, Jakarta.

This event aims to socialize about the latest conditions of refugees at the world level, especially in Indonesia, both in terms of protecting the human rights of refugees and legal developments as a joint effort in welcoming the 2023 Global Refugee Forum. In this discussion activity was present Nino Viartasiwi, Ph.D. (Academia of International Relations President University), Dr. Natalia Yeti Puspita, S.H., M.Hum. (Academia of Law Atma Jaya University Jakarta), Nimo Ahmed (Co-Founder of Sisterhood Community), Angga Reynady, S.H. (Empowerment and Legal Aid Staff of SUAKA) as the keynote speaker and two representatives from the refugee community as discussion panelists - Abeer Abulamzy and Nashaat Yousif. Also attending were Enny Soeprapto, an activist on refugee issues in Indonesia.

Dr. Natalia Yeti Puspita, S.H., M.Hum., started the session by presenting material related to climate change which also had an effect on the global migration crisis. There is great potential for an increase in the number of refugees due to climate change and natural disasters. Citing the findings of the Institute for Economics and Peace (IEP), she estimates that 1.2 billion people will be displaced due to climate change and natural disasters.

Furthermore, Dr. Natalia explained that refugees caused by the impact of climate disasters were not included in the category of refugees in the 1951 Convention which therefore did not meet the requirements for protection. He alluded to the case of Ioane Teitiota, a man from Kiribati who received legal protection from the UN Human Rights Committee because he was affected by climate change after being refused asylum by New Zealand.

The second speaker is Nino Viartasiwi, Ph.D. who explained her research with RDI UREF on the main challenges in protecting refugees and asylum seekers in Indonesia. She noted that Indonesia does not yet have an effective and comprehensive refugee management system, even though Presidential Regulation No. 125 of 2016 concerning Handling of Refugees from Abroad. She said that there was a lack of coordination among the Task Force (Satgas) in dealing with refugee issues. In addition, the absence of a legal definition of refugees in Indonesia confuses the public which ultimately hinders advocacy for better protection for refugees.

Nino added that there is a cultural and social gap between refugees and local communities. She believes that the process of social integration will be achieved more easily and quickly when refugees can mingle with the local community in terms of language, culture and social norms of the local community. So she highly recommends for refugees to learn Indonesian so that it can help them to blend in with society in the future.

The third speaker was Nimo Ahmed Co-Founder from Sisterhood Community. She explained the challenges of refugees and efforts to encourage the hopes of refugees in Indonesia through the organization she formed, namely the Sisterhood Community. Nimo introduced her organization and how she collaborated with local communities to support women refugees. Founded in 2018, Sisterhood Community is a self-led movement of women refugees providing training from basic to advanced skills such as makeup, sewing, graphic design, and public speaking.

In 2023, this community had 500 members throughout Indonesia. She is grateful that local community members support the activities of this community, as there are 33 non-refugee volunteers working with Nimo and the team. She closed her remarks by explaining a series of challenges his community would face throughout 2023. She mentioned that mental health and budget constraints could affect the sustainability of the community. Therefore, she suggested that finding accessible funds should be a priority for communities and civil society organizations that aim to help refugees in Indonesia.

Currently, there are at least 12,000 asylum seekers and refugees in Indonesia from around 50 countries. However, until now Indonesia has not ratified the 1951 UN Convention on Refugees and the 1967 Protocol regarding the Status of Refugees. Resilience is needed in the face of uncertainty about their future. So we need a forum that can then encourage refugees to be able to increase their self-capacity.

The panel discussion was closed with a presentation from the SUAKA. Represented by Angga, he reported on the empowerment and legal assistance programs that SUAKA had carried out so far. In terms of legal work, SUAKA has received a total of 45 cases in 2023. Data for May 2023 shows that issues of resettlement and violence dominate reports from the refugee community. From the report, Angga highlighted the worrying practice of Indonesian immigration in repatriating asylum seekers and/or refugees. SUAKA noted that there have been 3 cases of refoulement since 2020.

SUAKA believes that civil society organizations must work together to address issues of language barriers, awareness of unequal access to digital platforms, limited resources, and limited public awareness of refugee issues if we want to broaden the base of support for comprehensive refugee management. Angga also alluded to the Global Refugee Forum as a forum for discussion by representatives and state leaders regarding the joint obligation to protect refugees globally which will be held at the end of this year. It is hoped that the existence

of this forum can be used by Indonesia to show its good intentions in creating a legal umbrella related to the protection of the rights of refugees and asylum seekers and its implementation.

Happy World Refugee Day 2023!

**Contact Person:**

Atika Yuanita Paraswaty: 081383399078 / atika@suaka.or.id

Dewi F Rahmasari: 08557227774 / dewi@suaka.or.id